

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdullah, Faisal. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Abdullah, Rozalli. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Bruggink, J. J. H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed.Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- HR., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo.
- HR., Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo.
- Hartini, Sri, dkk. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeperto, Hartono. 1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Indroharto, 1994 *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 1999. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun.S. F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 7
- MD, Moh. Mahfud. 1998. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mustafa, Bachsan. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sajipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Salmon, Hendrik. 2010. “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik”. *Jurnal Sasi*. Vol 16 No. 4, Oktober-Desember hal. 16.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo. 1987. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, R. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soehino. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro , Rony Hanitjo. 1988. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Triwulan, Titik, T dan Ismu, Gunadi, Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079)

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)

Sumber Hukum lain

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 72/G/2017/PTUN.SBY